

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Dibesarkan di lingkungan santri sejak lahir, Yahya Cholil Staquf (yang selanjutnya disebut Gus Yahya) melihat aktivitas yang berhubungan dengan NU setiap hari. Kakek, ayah, dan pamannya adalah aktivis NU yang berperan penting dalam hidupnya. Selain itu, banyak orang yang sering berkunjung ke rumahnya untuk menjenguk kakek, bapak, dan pamannya terkait mengasuh NU. Dengan kata lain, Gus Yahya tumbuh besar di lingkungan NU dan bahkan mungkin sudah terpapar sejak masih dalam kandungan, andai saja sang anak yang belum lahir bisa mendengar dan memahami apa yang terjadi di sekitarnya.

Gus Yahya masih ingat betul bagaimana rasanya mengikuti kegiatan-kegiatan penting NU. Ketika dia berusia lima tahun pada tahun 1971, dia diundang ke konferensi oleh ibunya. Rapat akbar partai NU di Lapangan Rembang. Ia masih ingat bahwa KH. Idham Chalid, Ketua PBNU, dan KH. Bisri Mustofa, kakeknya sendiri, adalah juru kampanye saat itu. Kemudian, Muktamar NU ke-26 berlangsung di Semarang pada tahun 1979. Kiai Cholil, ayahnya, diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saat itu ayahnya menjabat sebagai Ketua PC (Pengurus Cabang) NU Kabupaten Rembang. Gus Yahya masih bersekolah di sekolah dasar saat itu (Dinata, 2022).

Pada rapat Dewan Syuro dan Tanfidz pada 3 Juni 1998, diputuskan untuk membentuk Tim 5 (lima). Tim yang diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin ditugaskan untuk merumuskan aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Tim Lima Tim Asistensi, yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU), berkumpul di Cipanas pada 26-28 Juni 1998 untuk merumuskan pembentukan partai politik sebagai wadah aspirasi warga Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan itu, beberapa keputusan dibuat, seperti keterkaitan antara partai politik yang akan dibentuk dengan Nahdlatul Ulama juga dicantumkan dalam kata Meskipun partai yang

akan dibentuk sebelumnya berusaha memenuhi keinginan anggota NU, Mabda Siyasi, yang pada akhirnya akan dikenal sebagai Partai Kebangkitan Bangsa, mendeklarasikan dirinya sebagai partai yang terbuka untuk semua orang., tidak hanya untuk kalangan tertentu tetapi lintas agama, suku, ras, atau golongan. Kemudian, dalam visi dan misi PKB, serta dalam jalur perjuangan, hal ini dimunculkan.

NU sebagai Komunitas muslim yang besar pada waktu itu di Indonesia, tak luput dari carut marut politik yang ada pada saat itu, Pada 4 juli tiga hari setelah Gus Yahya menikah para kiai mengadakan pertemuan di Lembang dan pada 6 Juli di Surabaya. Proses politik berjalan begitu cepat saat itu. Gus Yahya, yang berperan penting dalam proses itu, perlu langkah cepat untuk bergabung dengan kelompok Nahdliyin. Pada 23 Juli 1998, Partai Kebangkitan Bangsa secara resmi menyatakan diri sebagai partai politik.

Selama berlangsungnya proses Muktamar NU ke-34, terjadi ketegangan yang cukup kuat antara kelompok yang mendukung Gus Yahya dan Kiai Said. Mereka saling berkompetisi dalam mempromosikan calon pilihan mereka dan mengkritik calon yang bersaing. Pada saat itu, tentu saja ada kekhawatiran bahwa suasana yang begitu panas di antara para pendukung bisa berpotensi menciptakan kekacauan di arena Muktamar NU ke-34 (Hasan & Lestari, 2022).

Sejak dini hari Jumat, proses pemilihan ketua umum PBNU telah dimulai. Sebelum ini, beberapa nama muncul saat penjaringan kandidat, seperti Gus Yahya dengan 327 suara dan KH Said Aqil Siraj dengan 203 suara. Beberapa nama lain juga muncul, seperti KH As'ad Ali dengan 17 suara, KH Marzuki Mustamar dengan 2 suara, Ramadhan Buayo dengan 1 suara, dan 2 suara yang tidak sah. Untuk menjadi calon ketua tanfidziyah, seseorang harus mendapatkan minimal 99 suara, menurut aturan muktamar.

Karena itu, hanya Gus Yahya dan KH Said Aqil Siraj yang dapat maju dalam pemilihan berikutnya. Sesuai dengan musyawarah ahlul halli wal aqdi (AHWA), kedua calon tersebut meminta persetujuan Rais Aam terpilih, KH

Miftachul Akhyar, sebelum tahap pemungutan suara oleh utusan dari PCNU, PWNU, dan cabang istinewa.

Rais Aam diminta untuk menerima siapa pun kandidat yang akan maju dalam pemilihan. Pemilihan ketua umum PBNU masa khidmat 2021–2026 dimulai setelah mendapat persetujuan dari Rais Aam. Pleno dipimpin oleh Prof. M. Nuh. Gus Yahya mendominasi dukungan sejak perhitungan suara dimulai. Banyak orang sudah memperkirakan bahwa keponakan KH Mustofa Bisri (Gus Mus) akan menang karena hasil suara pada tahap penentuan bakal calon.

Gus Yahya berhasil dipilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Mukhtamar NU ke-34 di Lampung pada tanggal 22-23 Desember 2021. Dalam pidatonya, Gus Yahya menegaskan pentingnya komitmen NU untuk menyatukan berbagai komponen bangsa sesuai dengan karakter dan kultur NU, yang merupakan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan juga bertujuan untuk mengawal arah masa depan bangsa. Menurut Gus Yahya, kesadaran akan pentingnya menggandeng seluruh komponen bangsa menjadi sangat relevan dalam upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang bersifat ideologis, yang bertujuan untuk memecah belah bangsa. Gus Yahya mengingatkan bahwa sebagai warga negara Indonesia, perbedaan adalah hal yang wajar, tetapi tidak boleh menyebabkan gangguan terhadap kesatuan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam bidang politik, Gus Yahya menekankan pentingnya untuk tidak menggunakan politik identitas sebagai senjata politik, karena hal tersebut dapat membahayakan kesatuan Negara dan bangsa (Budianto, 2022).

Langkah dan inisiatif yang diambil oleh Gus Yahya ini kemungkinan besar akan menjadi topik perbincangan yang kontroversial dan menantang bagi kelompok-kelompok tertentu yang cenderung menggunakan politik identitas. Keberanian beliau pada saat ia membacakan Dekrit Presiden Gus Dur saat akan dilengserkan dari jabatannya. Gerakan Gus Yahya mengenai kontestasi politik pada Tahun 2024 tidak akan memberikan dukungan kelembagaan untuk calon

presiden dan calon wakil presiden tertentu. Sebaliknya, Gus Yahya memberikan kebebasan kepada warga NU untuk secara pribadi memilih calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan hak setiap warga negara. Namun, ia menegaskan bahwa PBNU tidak akan memberikan dukungan institusional kepada calon tertentu. Gus Yahya sangat khawatir dengan potensi perpecahan umat akibat kontestasi politik yang berlangsung. Ia menyadari bahwa isu identitas agama adalah isu yang sangat sensitif dan dapat memicu terjadinya kekacauan di dalam bangsa, berdampak buruk baik bagi organisasi NU maupun rakyat secara keseluruhan. Gus Yahya juga mengingatkan bahwa di Indonesia terdapat berbagai organisasi keagamaan selain NU, seperti Muhammadiyah, Persis, dan lainnya. Meskipun NU merupakan organisasi keagamaan terbesar secara matematis di Indonesia bahkan di dunia, isu identitas keagamaan dapat memecah belah bangsa. Dengan demikian, Gus Yahya berusaha untuk menghindari campur tangan secara kelembagaan dalam politik dan mendorong kesadaran akan pentingnya meminimalkan isu identitas keagamaan dalam kontestasi politik demi keutuhan bangsa (Sumarta, 2022).

Namun demikian, NU juga berperan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) yang sangat memperhatikan fungsi "*imarah*" atau pemerintahan. Gus Yahya menjelaskan bahwa NU memiliki peran yang serupa dengan pemerintahan, sehingga memerlukan struktur organisasi yang baik dan tanggung jawab dalam menjaga serta memberikan pelayanan yang optimal kepada anggotanya dan masyarakat (pada tanggal 10 Januari 2023).

Beliau juga menyatakan bahwa jika Nahdlatul Ulama dibandingkan dengan "*imarah*", maka organisasi tersebut memerlukan setidaknya 10 ribu ASNU, atau Asosiasi Santri Nahdlatul Ulama, untuk mengurus dan memberikan pelayanan kepada seluruh anggota Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Untuk mencapai kemandirian organisasi, Mukthamar Nahdlatul Ulama yang baru saja berakhir menjadi momentum penting. Namun, untuk mencapai kemandirian ini, pengelolaan organisasi harus mengubah jati dirinya. Satu

elemen kemandirian adalah bahwa NU harus bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik mana pun. (Halid, 2023).

Pemikiran Gus Yahya setidaknya melibatkan 3 pokok pemikiran, yakni; Agama dan Negara, Humanitarian Islam, Moderasi Beragama.

Pada hubungan antara islam dan negara, Gus Yahya berpendapat bahwa pada gilirannya, agama menjadi landasan identitas politik yang penting dalam bidang ini. Pertentangan sejarah yang terjadi selama berabad-abad, terutama era pra-modern, ketika negara, kekuasaan, dan agama digabungkan dalam pertempuran politik dan militer yang terus-menerus, semakin memperburuk keinginan untuk berperang. Ini adalah warisan sejarah mengerikan yang masih ada di dunia saat ini. (Staquf, 2020)

Sedangkan pada nilai Humanitarian islam terlihat dari gerakan muslim yang secara tegas mendukung Universal Declaration of Human Rights (UDHR), termasuk Pasal 18, dan menolak konsep negara atau kekhalifahan Muslim. Mereka menganut teori etika yang menghadapi realitas pluralitas agama masyarakat secara langsung dan konstruktif. Gerakan ini dipimpin oleh suara-suara terkemuka, terutama dari NU, organisasi masyarakat islam terbesar di dunia yang berbasis di Indonesia. Pandangan mereka, dikenal sebagai "Humanitarian Islam," telah disuarakan melalui banyak publikasi dalam bahasa Inggris, terutama sejak deklarasi kekhalifahan oleh ISIS pada tahun 2014. Melalui kajian etika Humanitarian Islam, terungkap bahwa kelompok Muslim ini, sesuai dengan prinsip-prinsip mereka, mendukung kebebasan beragama dan hak asasi manusia bagi penganut agama lain, termasuk umat Kristen. Etika mereka mencakup evaluasi serius terhadap norma moral universal, hubungan antara iman dan akal, prinsip-prinsip kemanusiaan mendasar, serta perlunya hukum (baik sipil maupun agama) untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan peran agama dalam struktur masyarakat (Christian, 2021).

Dalam pemikiran moderasi beragama, Gus Yahya menyatakan bahwa "Moderat tidak hanya berkaitan dengan menolak ekstremisme agama, tetapi

juga mengenai upaya untuk memunculkan kesadaran yang positif dari semua individu dalam membangun kesepakatan global yang mengarah pada peradaban yang adil dan harmonis, yang didasarkan pada penghargaan terhadap hak dan martabat manusia." (Humas UINSI, n.d.)

Dinamika politik yang dialami Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berjalan hingga terjadi perpecahan yang dimulai pada akhir tahun 1990-an hingga pada tahun 2019. Abdul Muhaimin Iskandar (Selanjutnya disebut dengan Cak Imin) dibebastugaskan sebagai ketua PKB oleh Abdurahman Wahid (Selanjutnya disebut dengan Gus Dur), yang saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Syuro PKB. Pilihan itu diambil Gus Dur setelah melihat Cak Imin bertindak menyimpang dari sikapnya. Cak Imin yang tak terima dicopot, kembali menggugat Gus Dur di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Anggota MLB menuntut diadakannya Muktamar Luar Biasa. MLB akhirnya diadakan setelah banyak tekanan. MLB sebenarnya dikelola secara merata kedua belah pihak. Anggota PKB yang mengikuti Gus Dur melakukan MLB di Ponpes Al-Asshriyyah, Bogor, sementara anggota yang mengikuti Cak Imin melakukannya di Hotel Mercure, Ancol. Keputusan Setelah pertemuan MLB, Gus Dur ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Sementara itu, Cak Imin ditunjuk sebagai Ketua Umum PKB dan KH Aziz Mansyur ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Syuro (Ainurrafik, 2021).

Sejak Cak Imin, menjabat sebagai Nahkoda Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Umum 2014-2019 kembali dapat dibanggakan, terutama oleh warga NU.

Dengan memperoleh 47 kursi DPR RI atau 11.292.151 suara (9,04%) pada pemilu 2014. Padahal, pada siklus Pemilu 2004–2009, atau lima tahun sebelumnya, PKB hanya memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen) dan memperoleh 28 kursi di DPR RI.

Tabel 1.1

**Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan umum
legislatif sejak 1999 – 2019**

Tahun	Suara	%	Kursi	%	+/-
1999	13,336,982	12,61	51	11,03	-
2004	11,989,564	10,57	52	9,45	1
2009	5,146,122	4,94	27	4,82	-25
2014	11,298,957	9,04	47	8,40	+20
2019	13.570.970	9,69	58	10,09	+11

Sumber : bps.go.id

Ketika PKB pertama kali ikut dalam pemilihan umum, masyarakat merespons dengan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah suara yang signifikan yang diperoleh PKB pada Pemilu 1999, di mana partai ini menempati posisi ketiga setelah PDI Perjuangan dan Golkar. PKB berhasil meraih 12,61% suara, sebuah pencapaian yang fantastis untuk partai baru. Biasanya, partai baru cenderung berada di posisi rendah atau maksimal lima besar pada pemilihan umum pertama mereka. Namun, kesuksesan awal ini tidak berlanjut pada Pemilu 2004 dan 2009. Perolehan suara PKB menurun menjadi 10,57% dan 4,95% masing-masing. Di tingkat DPR tingkat nasional, perolehan suara PKB di Pemilu Legislatif DPR Dapil DKI Jakarta juga terus menurun dari 3,60% pada tahun 1999, kemudian turun menjadi 3,30% pada Pemilu 2004, dan mencapai titik terendah pada Pemilu 2009 dengan hanya memperoleh 1,46% suara. Penurunan dua kali ini merupakan pukulan berat dan pelajaran bagi PKB. Dengan basis sosial yang kuat, seharusnya PKB dapat mempertahankan atau

setidaknya menyamai hasil Pemilu 2004. Namun, dalam kenyataannya, PKB mengalami penurunan elektoral yang signifikan. (Malik, 2016).

Sebagian elit PKB berpendapat bahwa konflik internal bukanlah penyebab utama penurunan suara partai tersebut. Dalam pidato pembukaan Seminar dan Workshop "Mencari Sistem Pemilu yang Berbasis Kedaulatan Rakyat" di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2006, Cak Imin, Ketua Umum DPP PKB, mengungkapkan keyakinan ini. Ia menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan politik adalah penyebab penurunan suara PKB. Hasil pemilu 2004 menunjukkan bahwa konstituen lama yang setia kepada partai mendukung PKB sebelumnya. Namun, sebagian kalangan berpendapat bahwa konflik internal dalam partai bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi penurunan perolehan suara PKB. Hal ini karena sebagian besar partai lainnya juga mengalami penurunan suara pada waktu yang sama. Masyarakat dikatakan merasa jenuh terhadap perkembangan politik, dan fenomena meningkatnya apatisisme politik, yang tercermin dalam tingginya jumlah golput (pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya), diduga menjadi salah satu faktor penurunan suara bagi PKB (Arifin, 2008).

Bendera kemenangan PKB terus dikibarkan dengan semangat yang membara dari Cak Imin. Ia tetap menantang keluarga besar PKB untuk lebih berupaya dengan mengedepankan politik yang ramah, mengalah pada kantong-kantong kekuasaan nahdliyin dan nahdliyah, serta meningkatkan interdependensi antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015, PKB, partai yang memiliki sejarah nasionalis religius, berhasil memilih 85 pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Kesuksesan PKB saat ini tidak lepas dari sumbangsih pendirinya, KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur, dan para ulama lainnya. Pengaruh dan kepemimpinan Gus Dur dalam politik Indonesia menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan dukungan PKB selama pemilu 1999. Partai Hijau ini memperoleh 13.336.982 suara (12,61 persen) pada pesta demokrasi pertama yang diikutinya, yaitu setara dengan 51 kursi DPR RI.

Itu tidak berakhir di sana; Strategi politik Gus Dur juga berhasil membujuk koalisi kiri-tengah untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri terpilih masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia melalui pemungutan suara di Sidang Umum MPR (Yusmana, 2019).

Dilansir dari media medcom.id yang berjudul “Ketum PBNU Sindir Cak Imin Rebut PKB dari Gusdur” Menurut kabar, Cak Imin berhasil menggulingkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan menguasai PKB. “PAN sekarang lebih mudah diakses. PAN jauh dari kontroversi seputar pencurian partai (seperti di PKB). Tidak ada yang seperti itu,” kata Gus Yahya dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan PAN, Sabtu, 18 Februari 2023. Gus Yahya menilai Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini lebih transparan lebih unggul dari PKB. Gus Yahya melanjutkan, PAN sebenarnya sudah berhasil menjadi partai yang berakal sehat (Amaluddin, 2023)

Sentimen dan gesekan-gesekan antara kedua tokoh ini tentu membuat masyarakat khususnya kader NU dan PKB menjadi mengingat kembali tragedi dualisme partai yang terjadi dalam tubuh PKB di tahun 2009 silam, yang sampai hari ini masih belum juga reda bahkan semakin disulut ketika Gus Yahya Mulai menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Berdasarkan fenomena yang telah dideskripsikan terkait perjalanan Gus Yahya dalam tubuh PKB hingga hari ini. peneliti melihat adanya potensi pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **“Pemikiran Politik Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Pengaruhnya Terhadap Politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Setelah Menjabat Ketua Umum Nahdlatul Ulama 2021-2023”**.

Rumusan Masalah

Masalah utama yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh KH. Yahya Cholil Staquf terhadap Partai Kebangkitan Bangsa? Masalah utama ini akan diurai dalam tiga sub pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Gus Yahya dalam Pemikiran Humanitarian Islam Pada Tubuh PKB?
2. Bagaimana Pengaruh Gus Yahya dalam Hubungan antara Agama dan Politik dalam Gerak DPP PKB?
3. Bagaimana Pengaruh Gus Yahya Dalam Orientasi dan Praktik Politik Dalam PKB?

Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditulis diatas ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Gus Yahya dalam pemikiran humanitarian islam pada tubuh PKB
2. Untuk mengetahui pengaruh Gus Yahya dalam hubungan antara agama dan politik dalam gerak DPP PKB
3. Menjelaskan secara komprehensif bagaimana pengaruh Gus Yahya dalam orientasi dan praktik politik dalam PKB

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hadirnya penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan pemikiran politik Islam, di mana hasil temuan dapat memperkaya literatur akademis dan teori politik Islam yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip politik

Islam dan konsep-konsep kunci yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori politik Islam yang lebih kontekstual.

Secara khusus, manfaat teoritisnya mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara prinsip-prinsip politik Islam dengan dinamika gerak politik. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual yang kuat untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dan diaplikasikan dalam konteks kebijakan politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori politik Islam yang relevan dengan dinamika politik kontemporer.

Selain itu, manfaat penelitian ini terlihat dalam kontribusinya terhadap pemikiran politik Islam dalam konteks gerak politik. Temuan penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip politik Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam aksi politik.

Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merancang strategi dan kebijakan politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga mampu memberikan dampak positif dalam perubahan sosial dan politik.

- b. Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman mendalam tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam konteks teori politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya terkait prinsip-prinsip ideologis, filosofi politik, dan struktur organisasi PKB.

Dengan memahami esensi teoritis partai ini, literatur akademis tentang politik Indonesia akan diperkaya dengan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai dinamika internal dan eksternal PKB sebagai subjek utama dalam sistem politik. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan teori politik yang lebih luas dengan mengidentifikasi model dan strategi politik yang diadopsi oleh PKB. Analisis mendalam terhadap ideologi, strategi kampanye, dan pandangan

politik partai ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh terhadap evolusi dan kontribusinya dalam peta politik nasional. Dengan merinci pemahaman teoritis ini, penelitian ini dapat membuka ruang bagi pengembangan teori politik yang lebih kontekstual dan aplikatif, memberikan landasan bagi studi-studi lanjutan tentang dinamika partai politik di Indonesia. Dengan demikian, manfaat teoritis dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran politik dan analisis partai politik, khususnya terkait dengan peran dan kontribusi PKB dalam sistem politik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: umumnya dapat meneliti lebih lanjut mengenai hasil dari ilmu yang telah didapat selama perkuliahan formal di prodi Ilmu Politik, maupun non-formal di Lembaga Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan Raudhatut Thalibin Rembang, yang kemudian diejawantahkan kedalam bentuk penelitian ilmiah ini. Khususnya adalah sebagai bentuk kontribusi kesadaran dan kepentingan penulis, notabene berposisi sebagai santri yang sedang berupaya mempelajari politik beserta dunianya.
- b. Bagi pembaca: umumnya dapat menjadi pedoman keilmuan atas pemikir politik hari ini dan hubungan—hubungan yang dibangun antar PKB dan NU dan bagaimana bentuk pola komunikasi politik yang telah dijalin.

Kerangka Berfikir

Demokrasi sangat khas dan berubah sesuai dengan betapa khasnya sistem sosial, politik, dan budaya dalam komunitas tertentu. Meski masih menjadi perdebatan, Ranney dan Kendall (1951:434) sependapat bahwa ada hal-hal tertentu yang dapat diputuskan dalam demokrasi dan ada hal-hal lain yang tidak dapat diputuskan. Dalam negara demokrasi, berikut adalah perbedaan-perbedaan paling signifikan yang tidak pernah hilang dan tidak dapat disepakati: (1) antara pihak yang memandang demokrasi hanya sebatas sistem pemerintahan dan pihak yang berpendapat bahwa demokrasi juga harus tercermin dalam bidang sosial dan ekonomi, struktur, dan cara hidup dan (2) antara sudut pandang yang menentang

kepemimpinan mayoritas dan mereka yang berpendapat bahwa demokrasi harus benar-benar dipimpin oleh mayoritas.” Namun, ada beberapa prinsip demokrasi yang diterima secara universal oleh mereka yang berdebat atau menulis tentang gagasan demokrasi. nilai-nilai tersebut antara lain menjaga kebebasan manusia, menanggapi keinginan rakyat sesuai dengan keinginan mayoritas pemilih, memberikan kesetaraan politik, dan menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. prinsip kerja sama, toleransi, dan kompromi (Nurdin, 2016).

Perlu ditekankan bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Islam adalah agama sekaligus negara, menurut almarhum Buya Hamka. Keduanya tidak lengkap, dan pemerintah sebenarnya adalah perlengkapan agama. Sudut pandang ini komprehensif mengingat bahwa mengamalkan ketaqwaan (ibadah) kepada Allah SWT dalam bentuknya yang paling murni, seperti *amar ma'ruf dan nahi munkar*, tidak mungkin tanpa dukungan penuh dari pemerintahan Islam (Wahid, 2010).

Gus Yahya dalam Buku Berjudul “Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama” menyatakan

Bahkan, krisis global yang berkembang telah memberikan peluang bagi NU dan NKRI untuk memainkan peran yang signifikan, khususnya dalam hal stabilitas dan keamanan. Konsep “Islam Kemanusiaan” (Islam untuk Kemanusiaan, Al-Islam lil Insaniyyah), yang diperkenalkan oleh Gerakan Pemuda Ansor pada tahun 2017 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, kemudian didukung oleh kerangka teologis yang sehat oleh Musyawarah Nasional Alim-Ulama NU di Kota Banjar, 2019, serta “Manifesto Nusantara” diresmikan di Yogya”.

Proses "memanusiakan" orang melibatkan dan melihat manusia dari perspektif filosofis dan psikologis. Perspektif filosofis adalah idealistik, mendalam, dan mendasar, sedangkan perspektif psikologis adalah pandangan psikologi. Belajar

dianggap berhasil jika Anda dapat memahami lingkungan dan diri Anda sendiri. Dengan mengkaji perilaku belajar dari sudut pandang pelaku bukan penonton, teori belajar humanisme ini bertujuan untuk memahaminya (Sjadzali, 1993).

Teori ini lebih tertarik pada gagasan belajar dalam bentuk idealnya karena berpandangan bahwa proses belajar pada akhirnya harus mengarah pada manusia itu sendiri. Paradigma pembelajaran humanisme ini bisa diibaratkan sebagai model pembelajaran sufi. Sufisme percaya bahwa orang memiliki tuntutan agama dan spiritual yang signifikan itu melahirkan implikasi dari ide aslinya yang dapat melahirkan ide intelektual dan moral religius (Budiarjo, 2007).

Dalam masyarakat kontemporer, jabatan-jabatan seperti presiden, menteri, ketua umum partai, organisasi, dan lain-lain mengandung otoritas. Misalnya, seorang presiden Amerika Serikat memiliki kekuasaan formal yang sangat besar, terlepas dari ciri-ciri pribadinya. Namun, kemampuan untuk menggunakan kekuatan posisi tersebut secara efektif sangat bergantung pada karakter seseorang (Surbakti, 2018) Mirip dengan elit partai, elit partai dengan sendirinya memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan kebijakan partai, terlepas dari karakteristik pribadinya. Gus Yahya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal untuk kepengurusan utama di awal-awal partai PKB dan merupakan salah satu aktor penting dalam pembentukan PKB.

